



PEMERINTAH
KOTA MALANG
JALAN TUGU NOMOR 1 MALANG

MALANGKUCECWARA
BERMARTABAT

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG

Tahun 2021



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



www.malangkota.go.id



[pemkotmalang](https://www.instagram.com/pemkotmalang)

Pernyataan Telah Direview



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada Nomor 2A Malang telp.(0341) 364450 – 321276

Kode Pos 65119

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Malang, 17 Maret 2022

Pit. INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG,

BANGBAM, SPd, SE, M.Si, CGCAE

Pembina

NIP. 19670317 199202 1 001



Ringkasan Eksekutif

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha Reformasi Birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu pula halnya dengan Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita-cita mensejahterakan rakyat. Upaya tersebut dilaksanakan Pemerintah Kota Malang melalui berbagai Kebijakan dan program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan dalam kinerja yang prima.

Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang tahun 2021 dinyatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya 94% dari target. Belum tercapainya target 100% dikarenakan pada tahun 2021 masih berlanjutnya bencana non-alam berupa pandemic COVID-19 yang berdampak pada berbagai macam sektor terutama sektor perekonomian. Adaptasi kondisi *new normal* membuat kita harus lebih mempersiapkan inovasi dalam pencapaian target kinerja. Hal ini karena perubahan pola kerja dalam pandemic COVID-19 cukup mempengaruhi pencapaian kinerja. Masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil dicapai, di antaranya Persentase Penurunan PMKS dan Indeks Kematangan SPBE. Sedangkan yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Terjadinya pandemic COVID-19 dan kebijakan penanganan COVID-19 memberi dampak menurunnya aktivitas perekonomian baik nasional dan regional, juga berimbas pada menurunnya aktivitas subsector ekonomi kreatif di Kota Malang. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2020, PDRB Ekonomi Kreatif Kota Malang sudah dapat bangkit pada angka 4,96 pada tahun 2021.

Kinerja yang prima juga ditunjukkan melalui efisiensi sumber daya dengan membandingkan kinerja dan anggaran sebesar 108,06%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang, yang akan terus dipelihara dan ditingkatkan guna mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Walikota untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sehingga Informasi Laporan Kinerja juga disampaikan dalam LPPD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui Kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk tahun 2018-2023.

Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:





KOTA MALANG BERMARTABAT

Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada tingkat harkat kemanusiaan dan sebuah nilai harga diri. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

“Kota Bermartabat” adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki berbagai keunggulan dan daya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka, dan berprestasi di berbagai bidang.



Untuk mewujudkan Visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
- Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
- Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
- Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023:

1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Indikator ketercapaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target sebesar 81,705. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
- 3) Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan.

2. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

Indikator ketercapaiannya adalah Pertumbuhan Ekonomi dengan target sebesar 5,00% dan Gini Rasio dengan target sebesar 0,392. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - 2) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu; dan
 - 3) Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.
3. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender
- Indikator ketercapaiannya adalah Angka Kemiskinan dengan target sebesar 3,98% dan Indeks Modal Sosial sebesar 85,68. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.
4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel
- Indikator ketercapaiannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 71,66. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
 - 2) Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif;
 - 3) Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
 - 4) Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan
Dan Sasaran Pembangunan Kota Malang

MISI I		Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga							
TUJUAN I		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya							
NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,770	0,780	0,790	0,770	0,771	0,772	0,772
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,821	0,823	0,823
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852

MISI II		Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan							
TUJUAN II		Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan							
NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,00%	6,10%	6,20%	6,30%	6,45%	6,45%
2	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	67,57	67,6	67,63	67,63

MISI III		Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender							
TUJUAN III		Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender							
NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	--	--	--	8,20%	7,50%	6,24%	6,24%
		Persentase penurunan PMKS	2,23%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,80	96,90	97,00	97,10	97,20	97,20

MISI IV		Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel							
TUJUAN IV		Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel							
NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,50	82,05	83,50	84,90	84,90
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,045	3,500	4,000	3,100	3,150	3,200	3,200
		Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,33
3	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
4	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	N/A	3,80	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54

Sumber: RPJMD Kota Malang 2018-2023



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.402/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 - 2023. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan yang meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Gini Ratio, (4) Angka Kemiskinan, (5) Indeks Modal Sosial, dan (6) Indeks Reformasi Birokrasi.

6

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN

Tabel 2.2

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,71
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	81,80
	Gini Rasio	0,39
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	3,98%
	Indeks Modal Sosial	85,68
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	71,66

Secara rinci IKU tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Malang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA MALANG TAHUN 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	85,00
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,20
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,57
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,80
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%
	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	82,05
		Opini BPK;	WTP
		Maturitas SPIP	3,10
		Rasio PAD.	0,28
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	74,38	
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00	287.963.388.293,00
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80	246.936.266.792,00
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	85,00	6.724.018.625,00
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%	45.210.030.636,00
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,20	310.385.035.561,00
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,57	45.368.013.112,00
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%	24.808.836.950,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,80	102.523.935.232,00
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00	
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%	9.214.928.248,00
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	82,05	1.444.166.046.066,00
	Opini BPK;	WTP	
	Maturitas SPIP	3,10	
	Rasio PAD.	0,28	
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	74,38	9.777.291.644,00
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	28.582.746.803,00



D. PARAMETER KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yakni Capaian Kinerja, Anggaran dan Sumber Daya. Parameter penentuan tingkat keberhasilan/kegagalannya dapat disimak dalam tabel berikut ini.

CAPAIAN KINERJA				ANGGARAN			SUMBER DAYA			
110 ke atas sangat berhasil (Sangat Efisien)	90 < s.d.110 berhasil (Efisien)	60 <= s.d. 90 Cukup berhasil (Cukup Efisien)	< 60 Tidak berhasil (Tidak Efisien)	> 105 Tidak Efisien	105 <= s.d.100 Cukup Efisien	<= 99 Efisien	110 keatas Sangat Efisien	100 >= s.d. 110 Efisien	90 >= s.d. 100 Cukup Efisien	< 90 Tidak Efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2021, terhadap capaian tahun sebelumnya, dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang tahun 2021 dinyatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya 94% dari target. Belum tercapainya target 100% dikarenakan pada tahun 2021 masih berlanjutnya bencana non-alam berupa pandemic COVID-19 yang berdampak pada berbagai macam sektor terutama sektor perekonomian. Adaptasi kondisi *new normal* membuat kita harus lebih mempersiapkan inovasi dalam pencapaian target kinerja. Hal ini karena perubahan pola kerja dalam pandemic COVID_19 cukup mempengaruhi pencapaian kinerja. Masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil dicapai, di antaranya Persentase Penurunan PMKS dan Indeks Kematangan SPBE. Sedangkan yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Terjadinya pandemic COVID-19 dan kebijakan penanganan COVID-19 memberi dampak menurunnya aktivitas perekonomian baik nasional dan regional, juga berimbas pada menurunnya aktivitas subsector ekonomi kreatif di Kota Malang. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2020, PDRB Ekonomi Kreatif Kota Malang sudah dapat bangkit pada angka 4,96 pada tahun 2021.

Bertambahnya angka pengangguran juga tidak lepas dari dampak COVID-19 yang berkelanjutan mulai tahun 2020. Namun perlu analisa mendalam terkait angka pengangguran karena terjadi perubahan pola perdagangan. Yang dulu terbiasa *offline* dan memiliki kantor sekarang menjadi lebih banyak *online* dengan bekerja dari rumah. Perhitungan jumlah para pekerja di rumah ini, apakah menjadi kategori pengangguran atau tidak, masih perlu analisa mendalam.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, pemerintah kota malang telah melaukan reuiu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan dampak COVID-19, maupun target kinerja, sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD tahun 2018-2023.



a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,00
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,20
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,57
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,20%
		Persentase penurunan PMKS	5,00%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	86,80
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	60%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	82,05
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3,10
		Rasio PAD	0,28
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,38
	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21



- b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
 Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Visi	Kota Malang Bermartabat				
MISI 1	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar lainnya Bagi Semua Warga				
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00	78,45	101,88%
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80	82,09	100,35%
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,00	84,73	99,68%
MISI 2	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdayasaing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan, dan keterpaduan				
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%	4,96%	80,00%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,20	4,23	100,71%
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,57	60,46	89,48%
MISI 3	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keperpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender				
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,20%	9,65%	82,32%
		Persentase penurunan PMKS	5,00%	-0,42%	0,00%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	86,80	84,15	96,95%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,16	98,10%



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 4	Memastikan Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel				
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	60%	100%	167,00%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	82,05	80,05	97,56%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,1	3,634*	117,23%
		Rasio PAD	0,28	0,28	100%
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,38	74,68*	100,4%	
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	2,73	64,85%	

c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77	76,71	76,86	78,45	99,62%	100,08%	101,88%	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,4	81,77	81,99	82,09	100,21%	100,11%	100,35%	
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	84,6	85,81	85,67	84,73*	101,31%	101,03%	99,68%	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	8,10%	-8,85%	4,96%*	135,00%	0%	80%	
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,14	4,06	4,23	106,15%	100,25%	100,71%	
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	65,27	75,54	60,46	78,71%	90,26%	89,48%	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
lingkungan hidup									
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,65%	5,88%	9,61%	9,65%			82,32%	
	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	3,31%	-1,08%	0,42%*	66,20%	0%	0%	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82,00	84,6	81,95	84,15	101,20%	96,19%	96,95%	
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	94,71	94,72	94,97	95,16*	97,84%	98,01%	98,10%	
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	26,37%	54%	100%	105,48%	135,00%	166,67%	
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	70,11	75,00	80,05	80,05	99,14%	99,44%	97,56%	
	Opini BPK;	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	
	Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,045	3,634*	87,00%	76,13%	117,23%	
	Rasio PAD.	0,22	0,3	0,25	0,28	125,00%	96,15%	100%	
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64	66,61	67,06	74,68*	93,21%	91,96%	100,4%	
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	N/A	2,85	3,7	2,73	75,00%	90,46%	64,85%	

d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	78,45	101,62%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	82,09	99,74%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	84,73*	99,45%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	4,96%*	76,90%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,23	94,00%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	60,46	89,40%
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,24%	9,65%	45,35%
		Persentase Penurunan PMKS	5,00%	-0,42%*	0%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,80	84,15	93,50%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,16*	97,90%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%	100%	167,00%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	82,05	80,05	94,29%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,1	3,634*	113,56%
		Rasio PAD.	0,33	0,28	84,85%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	74,38	74,68*	100,40%
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	2,73	60,13%



e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00	78,45	101,88%	287.963.388.293,00	278.968.429.048,87	96,88%	105,16%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80	82,09	100,35%	246.936.266.792,00	224.370.697.879,37	90,96%	110,32%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,00	84,73*	99,68%	6.724.018.625,00	6.225.401.939,00	92,58%	107,67%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%	4,96%*	80%	45.210.030.636,00	36.991.480.226,09	81,82%	97,78%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,20	4,23	100,71%	310.385.035.561,00	284.633.749.902,92	91,70%	109,83%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,57	60,46	89,48%	45.368.013.112,00	41.458.689.694,33	91,38%	97,92%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,2	9,65%	82,32%	24.808.836.950,00	23.210.011.826,00	93,56%	43,99%
	Persentase Penurunan PMKS	5	-0,42%*	0%				
	Rata-rata Capaian			41,16%				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,80	84,15	96,95%	102.523.935.232,00	98.260.052.544,00	95,84%	101,76%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,16*	98,10%				
	Rata-rata Capaian			97,53%				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%	100%	166,67%	9.214.928.248,00	7.956.717.474,00	86,35%	193,02%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	82,05	80,05	97,56%	1.444.166.046.066,00	1.188.029.560.038,68	82,26%	126,06%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%				
	Maturitas SPIP	3,10	3,634*	117,23%				
	Rasio PAD.	0,28	0,28	100%				
	Rata-rata Capaian			104%				
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	74,38	74,68*	100,40%	9.777.291.644,00	8.277.185.020,30	84,66%	118,59%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	2,73	64,85%	28.582.746.803,00	27.571.742.920,00	96,46%	67,23%
				94%	2.561.660.537.962,00	2.225.953.718.513,56	86,89%	108,06%

f) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan. Target dapat tercapai 101,88% dengan dukungan program prioritas yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pencapaian kinerja sebesar 97% (rata-rata dari capaian APK PAUD, APM PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, dan rata-rata capaian peningkatan karakter PAUD, SD dan SMP), terutama dukungan pada capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Akan tetapi perlu upaya dalam pencapaian APK dan APM PAUD serta APM SD.
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan. Target dapat dicapai 100,35%, utamanya dengan dukungan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemenuhan SPM urusan Kesehatan dan penanganan pandemic Covid-19. Meskipun demikian masih perlu upaya perbaikan pada indikator program Angka Kematian Ibu dan NDR yang belum dapat tercapai sesuai target.
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity*. Target dapat dicapai 99,68% dengan dukungan beberapa program di antaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

(IKLI). Target dapat dicapai 100,71% dengan dukungan beberapa program di antaranya Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Hampir semua indikator dapat tercapai dengan baik, namun perlu upaya perbaikan sendiri untuk mencapai target program yang belum sesuai harapan terutama pada penanganan infrastruktur permukiman, rumah tidak layak huni dan ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung.

5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Target tercapai dengan rata-rata 97,53% dengan dukungan program terbesar adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di 57 Kelurahan) dan beberapa program pada Dinas Sosial P3AP2KB untuk fokus pada perbaikan IPG seperti Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan. Target tercapai 166,67% dengan dukungan program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dari sejumlah 26 Peraturan Daerah yang berisi sanksi, sebanyak 15 Peraturan Daerah ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan 11 Peraturan Daerah lainnya oleh Perangkat Daerah terkait. Target capaian program semua Peraturan Daerah telah ditegakkan, atau sebesar 100%.
7. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Rasio PAD. Target rata-rata tercapai 104% melalui dukungan beberapa program di antaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan.

8. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN. Target tercapai 100,4% melalui dukungan Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber DayaManusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (terkait standard kompetensi yang ditetapkan). Adapun capaian kinerja keseluruhan program hampir memenuhi target dengan rata-rata 97,61%.

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif disebabkan dukungan Perangkat Daerah terhadap pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan penjualan baik secara langsung maupun melalui platform digital. Namun demikian pandemi COVID-19 masih sangat berpengaruh terhadap dunia usaha sehingga peningkatan ekonomi kreatif belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar 4,96% atau capaian 80% dari target RPJMD, dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar -8,85%.
2. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, dengan target tercapai sebesar 89,48%. Meskipun belum sesuai harapan, perlu upaya peningkatan indeks pada variabel IKLHD untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan rata-rata capaian sebesar 41,16% di mana indikator persentase penurunan PMKS tidak tercapai dikarenakan berlanjutnya pandemic COVID-19 yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Angka kemiskinan maupun Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan. Sedangkan PMKS termasuk di dalamnya adalah jumlah fakir miskin. Hal ini yang membuat indikator tersebut tidak dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan persentase PMKS telah dilakukan dengan memberikan pelatihan dasar kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial serta memberikan bantuan sosial baik tunai maupun non tunai. Namun karena pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung, maka penurunan

persentase PMKS masih belum signifikan. Apabila dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar -1,08%, maka tahun 2021 sudah mengalami progress meskipun belum bisa menurunkan jumlah PMKS secara signifikan.

4. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan target tercapai sebesar 64,85%. Indeks Kematangan SPBE masih belum dapat mencapai target dikarenakan perubahan variable/Komponen dan penambahan indikator (yaitu indikator Manajemen SPBE) dalam penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB sehingga hasil akhir penilaian menjadi lebih kecil.

Adapun **Upaya Perbaikan** dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

1. Pengintegrasian program dan kegiatan pengentasan/penanggulangan kemiskinan antara kolaborasi Perangkat Daerah harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melibatkan masyarakat sehingga pembinaannya tepat sasaran dan strategi ke depannya adalah updating data kemiskinan sesuai peraturan yang berlaku serta penggunaan data kemiskinan untuk sasaran program dan kegiatan yang berkelanjutan.
2. Peningkatan upaya pemenuhan variabel pada komponen SPBE melalui pemenuhan indikator Manajemen SPBE dan penguatan peraturan perundang-undangan daerah terkait SPBE.
3. Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah dan *stake holder* lainnya dalam pembinaan ekonomi kreatif melalui penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui pendampingan yang berkelanjutan, Aktivasi MCC (wadah/ekosistem ekonomi kreatif), Aktivasi *co-working space* di 5 kecamatan, pembinaan/event industry kreatif.
4. Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah dan *stake holder* lainnya dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui penguatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi pelaksanaan *job fair* melalui aplikasi



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 21 Oktober 2021
WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,770
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,818
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,850
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,2 %
5	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,20
6.	Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,57
7.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	8,2%
		2. Persentase penurunan PMKS	5 %
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,868
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00
9.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60 %
10.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	1. Nilai Sakip	82,05
		2. Opini BPK	WTP
		3. Maturitas SPIP	3,1
		4. Rasio PAD	0,28
11.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,38
12.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Pengelolaan Pendidikan	280.528.340.100,00
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	756.074.000,00
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	214.828.859.123,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.047.728.320,00
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	449.072.800,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.541.468.760,00

No.	PROGRAM	PAGU
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.782.969.780,00
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.010.705.000,00
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.151.690.410,00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	25.601.154.115,00
11	Program Pengembangan Permukiman	13.293.994.493,00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	38.735.552.444,00
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.207.500.488,00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	161.237.295.194,00
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	710.741.336,00
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.791.132.568,00
17	Program Pengembangan Perumahan	3.785.857.000,00
18	Program Kawasan Permukiman	99.773.000,00
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	596.070.000,00
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.112.391.672,00
21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.695.926.360,00
22	Program Penanggulangan Bencana	3.106.492.898,00
23	Program Pemberdayaan Sosial	1.127.197.900,00
24	Program Rehabilitasi Sosial	20.408.595.197,00
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.931.814.760,00
26	Program Penanganan Bencana	252.016.093,00
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	706.338.100,00
28	Program Pengembangan Kebudayaan	425.786.350,00
29	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	479.450.000,00
30	Program Pembinaan Sejarah	231.001.600,00
31	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	588.930.000,00
32	Program Pengelolaan Permuseuman	1.437.900.000,00
33	Program Pengelolaan Tanah Kosong	100.000.000,00
34	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	509.436.760,00
35	Program Perlindungan Perempuan	300.619.300,00
36	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	156.760.000,00
37	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	358.459.900,00
38	Program Perlindungan Khusus Anak	879.218.076,00
39	Program Pengendalian Penduduk	246.034.830,00
40	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.121.485.600,00
41	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.214.539.500,00
42	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	700.000.000,00
43	Program Penempatan Tenaga Kerja	32.099.900,00
44	Program Hubungan Industrial	350.775.000,00
45	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	134.695.500,00
46	Program Pelayanan Penanaman Modal	936.365.952,00
47	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	468.312.900,00
48	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	179.469.724,00
49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.158.058.020,00
50	Program Pengawasan Keamanan Pangan	122.800.000,00
51	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	622.711.400,00

No.	PROGRAM	PAGU
52	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.201.341.208,00
53	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	24.530.816.832,00
54	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	4.000.000,00
55	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	220.805.000,00
56	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	735.962.000,00
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	44.525.000,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	16.116.719.104,00
59	Program Pendaftaran Penduduk	1.111.449.000,00
60	Program Pencatatan Sipil	1.592.346.900,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	232.807.000,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	55.000.000,00
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.264.903.085,00
64	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.805.133.000,00
65	Program Aplikasi Informatika	19.402.669.145,00
66	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.121.582.798,00
67	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	317.772.236,00
68	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	59.040.078,00
69	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	187.406.912,00
70	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	833.643.599,00
71	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	349.754.210,00
72	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.716.833.400,00
73	Program Pengembangan UMKM	2.867.359.640,00
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.447.837.580,00
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.487.077.859,00
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600.000.000,00
77	Program Pembinaan Perpustakaan	1.468.068.663,00
78	Program Pengelolaan Arsip	213.894.280,00
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.408.300.525,00
80	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	338.999.980,00
81	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	415.568.000,00
82	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	408.980.509,00
83	Program Penyuluhan Pertanian	169.694.000,00
84	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	163.510.000,00
85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	24.815.034.147,00
86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	353.145.300,00
87	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	384.225.900,00
88	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	800.736.391,00
89	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	10.373.693.450,00
90	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	12.180.000,00
91	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.626.200,00

No.	PROGRAM	PAGU
92	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.623.669.000,00
93	Program Pemasaran Pariwisata	469.658.000,00
94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.005.436.500,00
95	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.968.750.866,00
96	Program Perekonomian Dan Pembangunan	19.421.736.000,00
97	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	30.960.871.577,00
98	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.126.237.200,00
99	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.198.763.225,00
100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.639.870.000,00
101	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	84.944.677.582,00
102	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.522.170.646,00
103	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.396.471.000,00
104	Program Kepegawaian Daerah	5.806.474.894,00
105	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.683.319.750,00
106	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.368.767.387,00
107	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	949.496.200,00
108	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	231.819.000,00
109	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.527.759.000,00
110	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	149.330.900,00
111	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.293.224.000,00
112	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.828.162.356,00
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.233.227.645.676,00
114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.463.193.735,00
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98.737.810.867,00
116	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.834.180.447,00
117	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	334.937.000,00

Malang, 21 Oktober 2021



Drs. H. SUTIAJI

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Berhasil . Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat. Terutama kesiapsiagaan semua elemen dalam menghadapi dan menangani pandemi COVID-19, serta upaya pemulihan pasca COVID-19 yang berdampak pada semua sektor baik perekonomian maupun kesejahteraan sosial. Sehingga Kinerja Kota Malang masih dalam kategori "berhasil" meskipun belum dapat tercapai 100%. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam menghadapi kondisi New Normal melalui peningkatan adaptasi digital dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang.

Malang, Maret 2022
WALIKOTA MALANG,
SUTIAJI

